

Akuntabilitas Pemimpin Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi dan Sosiologi

Derry Nugraha^{1*}, Agusti Agusti²

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Indonesia.

*Corresponding author: -

Abstract: This study aims to describe and analyze the accountability of educational leaders based on religion, philosophy, psychology and sociology. 1). Based on the religion of Allah SWT as a result of an education that is fair, kind, satisfying, not deceptive, not against rules and not self-contradictory. 2). What is philosophically grounded is a moral responsibility to the rules of logical reasoning that arise from educational acts that must be carried out with substantive, sustained, practical, progressive and reconstructive diligence. . 3). Psychology is based on the emotional responsibility of feeling human about something, the correct character, behavior, and educational actions that should be taken in situations. Four). Sociology is grounded in social responsibility to social status through education and must be practiced in ways that meet the functional needs of society and the stratification of political, economic and social status.

Keywords: educational accountability; religion-based accountability; philosophy-based accountability; psychology-based accountability; sociology-based accountability; leaders.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pemimpin pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi dan sosiologi. 1). berbasis berdasarkan agama kepada Allah SWT sebagai akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus adil, baik hati, memuaskan, tidak menipu, tidak melanggar aturan dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. 2). berbasis filsafat adalah tanggung jawab mental untuk aturan berpikir logis akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati substansial, abadi, pragmatis dan progresif dan rekonstruktif. 3). berbasis psikologi adalah tanggung jawab emosional untuk merasakan manusia tentang sesuatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati karakter, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya. 4). berbasis sosiologi adalah tanggung jawab sosial atas kedudukan sosial melalui pendidikan, harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, stratifikasi status politik, ekonomi dan sosial.

Kata kunci: akuntabilitas pendidikan; akuntabilitas berbasis agama; akuntabilitas berbasis filsafat; akuntabilitas berbasis psikologi; akuntabilitas berbasis sosiologi; pemimpin.

Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Received: 02-01-2023

Revised: 10-11-2023

Accepted: 25-11-2023

Published: 28-11-2023

PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang semakin maju telah menyebabkan perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal masyarakat yang harus senantiasa melakukan perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Mutohar dalam Zahro 2018 (Zahro, 2018) menyatakan: “Meningkatkan mutu sekolah pada hakekatnya merupakan strategi untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab pengambilan

keputusan kepada sekolah, yang mencakup keterlibatan individu baik staf sekolah maupun anggota masyarakat”.

Peningkatan mutu merupakan kerja keras yang harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Kualitas sebuah sekolah tidak hanya tercermin dari bagaimana kinerja sekolah tersebut dan lulusan seperti apa yang dihasilkannya. Namun demikian, mutu sekolah juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah, bagaimana pendidikan dikelola dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pendidikan, dengan memperhatikan faktor yang berkembang.

Kualitas pembelajaran di sekolah tercermin dari kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka hal pertama yang perlu diperbaiki adalah kualitas pembelajaran. Dalam hal ini kemampuan guru dalam mengarahkan proses pembelajaran harus ditekankan, agar proses pembelajaran menjadi inovatif dan kreatif. Hal ini karena belajar merupakan bentuk nyata dari kegiatan pendidikan yang sesungguhnya dari mana siswa memperoleh pengalaman belajar. Untuk mencapai proses tersebut, guru memegang peranan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

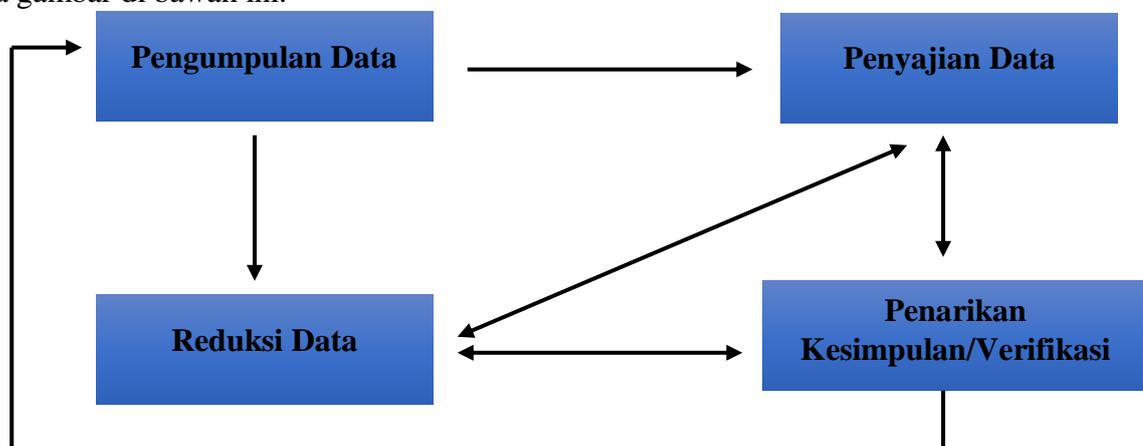
Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran, penanggung jawab pendidikan sendiri telah banyak melakukan kegiatan yang inovatif dan kreatif. Misalnya, peningkatan kualifikasi guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, perbaikan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, dll. Tentunya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, guru harus menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Berkaitan dengan hal tersebut, kurikulum jelas memegang peranan penting dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, dimana kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan, yang membentuk kurikulum dalam satu periode pendidikan tingkat berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran. Dalam hal ini, mutu pendidikan tergantung pada bagaimana pembelajaran dilakukan dan kurikulum yang diterapkan. Di sekolah yang digambarkan sebagai sekolah yang lebih baik, tentu ada perbedaan kualitas pembelajaran yang diberikan. Sebagai sekolah unggulan, kualitas pembelajaran mereka tentu lebih baik yang tercermin dari dukungan mereka terhadap pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung, seperti: sarana dan prasarana yang memadai, guru yang berkualitas dan terampil secara teknis, lingkungan sekolah yang menyenangkan dan pembelajaran yang menyenangkan.

Namun sekolah berkategori yang lebih tinggi (unggul) bukan berarti lepas dari kekurangan yang ada (Maryono, 2018), disini peran pendidik sangat penting, karena untuk merancang proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif, guru tentunya harus terus berinovasi dan kreatif, sehingga dapat menggunakan produk-produk inovatif yang ada untuk meningkatkan pembelajaran untuk ditingkatkan agar mutu pendidikan terus meningkat (Naerih & Nurtiana, 2021). Kita tahu bahwa pendidik memiliki kewajiban untuk menerapkan kegiatan inovatif dan kreatif di kelasnya, selain menerapkan produk inovatif yang diperlukan, guru memiliki kewajiban untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya sebagai pendidik yang berkualitas. Mutu dalam konteks pendidikan meliputi konsep mutu input pendidikan, input proses, proses dan output. Input pelatihan adalah semua yang perlu ada karena perlu menjalankan proses. Pendidikan selalu berubah seiring waktu.

Oleh karena itu, peran pemimpin lembaga pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Akuntabilitas pendidikan sekolah dapat diartikan sebagai ekspresi tanggung jawab yang mencerminkan sikap transparan para pihak sekolah terutama pemimpin lembaga pendidikan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan menggunakan teknik *library research* (Sidiq et al., 2019), materi dianalisis menggunakan paradigma analisis *Miles dan Huberman* dalam Anwar 2020 (Anwar et al., 2022) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan/pemeriksaan berhubungan dengan akuntabilitas pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi dan sosiologi. Proses teknis keempat analisis data ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akuntabilitas Pendidikan

Dalam kamus Bahasa Inggris *The Cambridge English Dictionary* disebutkan bahwa “*accountability*” diartikan “*the fact of being responsible for what you do and able to give a satisfactory reason for it, or the degree to which this happens*”. Dalam kamus Bahasa Inggris *The Cambridge English Dictionary* disebutkan bahwa “*Education*” diartikan “*the process of teaching or learning, especially in a school or college, or the knowledge that you get from this*”. Jadi, Akuntabilitas pendidikan adalah tindakan mewujudkan pertanggungjawaban dalam proses tindakan mendidik/edukasi.

Dalam konteks pendidikan khususnya, menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI (Hamdi, 2020), akuntabilitas pendidikan meliputi tiga, yaitu:

1. Akuntabilitas keberhasilan, dimulai dengan penetapan tujuan-tujuan yang spesifik. Dalam konteks ini, usaha pendidikan diorientasikan untuk menutup jurang antara keadaan awal peserta didik dengan kondisi akhir yang diharapkan sebagaimana yang menjadi tujuan yang spesifiknya. Jenis akuntabilitas ini, menilai keberhasilan pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya;
2. Akuntabilitas profesional mengacu pada sejauh mana standar praktis tentang sikap, keterampilan, dan teknik-teknik yang telah teruji secara sah dan handal dipakai dalam mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, akuntabilitas profesional ini berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan karena mengingat dengan keahlian yang profesional tersebut, guru bekerja mengusahakan keberhasilan siswa; dan
3. Akuntabilitas sistem dimana sistem pendidikan hendaknya akuntabel dalam mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai kemudahan (fasilitas) yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam aplikasi akuntabilitas yang berkaitan dengan dirinya sendiri, suatu sistem harus mampu mengukur pencapaian siswa, serta menghubungkan hasil pengukuran itu dengan tujuan, harapan masyarakat, dengan *resources* yang tersedia, dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah dipraktekkan.

Sebagai alternatif pemikiran pada terminologi akuntabilitas, termasuk bidang pendidikan di Indonesia berpedoman pada pendapat para ahli dan pemerintah ini, deskripsi dan analisis berdasarkan agama, filsafat, psikologi dan sosiologi tugas yang

sangat mendesak. Karena agama erat kaitannya dengan tanggung jawab spiritual, filsafat berkaitan erat dengan tanggung jawab berpikir, psikologi berkaitan erat akuntabilitas psiko-emosional dan sosiologi terkait erat dengan tanggung jawab dimana keempatnya harus menjadi dasar pertimbangan yang paling penting dan lengkap..

Pembahasan

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama

Dalam agama Islam, banyak ayat al-Quran yang menjadi basis akuntabilitas pendidikan, antara lain *pertama*, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Qiyamah: 36, *“apakah manusia mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggungjawaban?”*. *Kedua*, firman-Nya dalam Q.S. Al-Isra: 36, *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”*. *Ketiga*, sabda Nabi Saw., *“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”*.

Dua ayat dan sebuah hadits menunjukkan hal ini dengan jelas bahwa akuntabilitas pendidikan adalah perintah/persyaratan yang mengikat dari Sang Khalik untuk setiap makhluk. dia adalah kewajiban setiap orang kepada Allah SWT adalah tanggung jawab rohani karena sikapnya sendiri atau karena pihak lain yang dipimpinnya dimanapun dan kapanpun. Setiap orang harus siap untuk memikul beban atau membawa semuanya sesuatu, tidak hanya berupa pahala, tetapi juga berupa azab dari Tuhan sesuai kebutuhan atau dibebankan.(Anwar et al., 2022).

Bagaimana penerapan akuntabilitas *uluhiyah*? Dalam Q.S. Al-Nahl: 90, Allah Swt. berfirman, *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. Menurut ayat tersebut, dua prinsip penting dalam melakukan akuntabilitas pendidikan diantaranya : 1) wajib berlaku adil, dan (2) haram berlaku keji (Anwar et al., 2022).

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang tanggung jawab berbasis agama adalah tanggung jawab spiritual setiap orang adalah kepada Allah SWT untuk tindakan pendidikannya, yang harus adil, ihsan, memuaskan, tidak mengecewakan, tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT.

Sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan sudah seharusnya memiliki pandangan, asumsi, dan pemikiran serta keyakinan yang kuat dari segi spiritual untuk

menjawab tantangan dinamika pendidikan mendatang. Keyakinan dan bimbingan spiritual mewajibkan pendidikan dikelola dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan setiap tindakan berupa kreativitas dan inovasi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Filsafat

Banyak aliran filsafat yang dapat dipilih sebagai basis akuntabilitas pendidikan, antara lain aliran/paham/cara berpikir :

1. *esensialisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada ide dan data-data realistik dimana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara ideal (sesuai ide/nilai) dan realistik (faktual / tidak manipulatif);
2. *perennialisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada keabadian dimana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara konstan/ berkelanjutan (tidak temporal/sesaat);
3. *pragmatisme* dan *progresivisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada hal-hal praktis dan maju dimana pendidikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan praktek yang sebenarnya dan demi perkembangan selanjutnya yang lebih baik; dan
4. *rekonstruksionisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada tindakan rekonstruksi dimana akuntabilitas dimaksudkan untuk merekonstruksi/memperbaiki kembali mutu pendidikan yang sudah ada (Kristiawan, 2016).

Menurut Saidah A.H dalam jurnal *Al Asas* (Saidah, 2020) menjelaskan tentang aliran filsafat yang menjadi pedoman akuntabilitas pendidikan diantaranya :

1. *Essensialisme* menghendaki agar landasan pendidikan berakar dari nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun dan telah turuntemurun dari zaman ke zaman, dengan mengambil zaman renaissance sebagai permulaan;
2. *Perennialisme* menghendaki pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan absolut;
3. *Pragmatisme* dan *Progresivisme* menghendaki pendidikan diarahkan pada upaya yang bukan semata-mata memberikan pengetahuan teoritis, melainkan pada upaya pragmatis dan progresif untuk melakukan berbagai kegiatan guna memecahkan masalah yang dihadapi, dan;

4. Rekonstruksionisme merupakan lanjutan gerakan progresivisme yang hampir sepaham dengan perenialisme yang menghendaki gerakan mengatasi krisis masyarakat modern. Rekonstruksionisme mencoba membina konsensus secara luas yaitu dengan mencari kesepakatan semua orang/rakyat mengenai tujuan inti pendidikan secara demokratis, bukan yang diatur atau dikuasai oleh golongan-golongan tertentu.

Berdasarkan filsafat adalah akuntabilitas setiap orang untuk aturan berpikir logis karena pendidikannya tentang apa yang harus dilakukan dengan cara tertentu pemikiran esensial, gigih, pragmatis dan progresif dan rekonstruktif.

Dari definisi etimologis di atas dipahami bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis filsafat adalah pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik berasaskan pada kecintaan terhadap penggunaan dan pemahaman akal sehat, termasuk yang dihasilkan oleh para ahli filsafat yang tepat dan sesuai.

Sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, pemimpin dalam membawa perubahan harus berperan sebagai fasilitator, yaitu kepala sekolah bertugas memberikan dukungan terhadap ide-ide atau inisiasi perubahan yang selaras dengan visi perubahan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta saran dari internal maupun eksternal sejalan dengan dinamika pendidikan yang semakin dinamis.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Psikologi

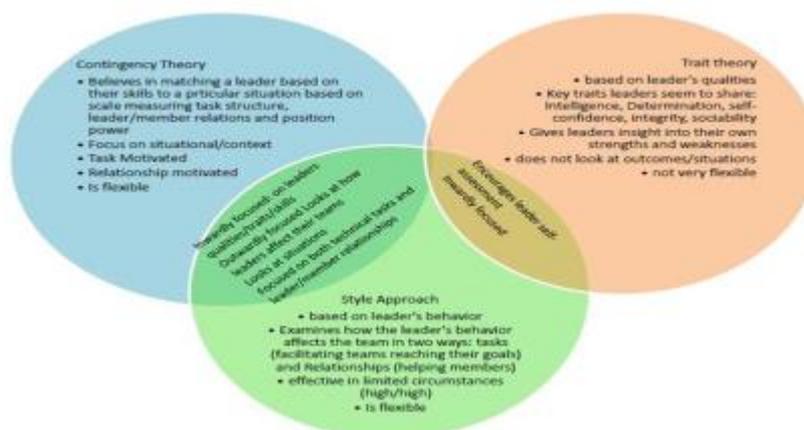
Dari aliran-aliran psikologi itulah yang dapat dijadikan landasan akuntabilitas pendidikan adalah model *Trait-Behavioural-Contingency* seperti yang dijelaskan pada Anwar et al 2022 (Anwar et al., 2022):

1. *trait model* yang berpusat pada kepedulian emosionalnya terhadap pola perilaku di mana tanggung jawab untuk pendidikan terletak sifat yang melekat pada setiap individu dan kelompok;
2. *behaviour model* mengarahkan perhatian emosional mereka pada pola perilaku yang akuntabilitas pendidikan menjadi perilaku alami yang tertanam dalam diri setiap individu dan kelompok; dan
3. *contingency model* yang memfokuskan perhatian emosionalnya pada model situasi lingkungan di mana tanggung jawab pendidikan menjadi bagian yang tidak ada terpisahkan dari kebutuhan masyarakat sekitar.

Karena akuntabilitas pendidikan adalah pertanggungjawaban untuk pemimpin, maka ketiga model ini erat kaitannya dengan watak dan budi pekerti pemimpin.

Mengacu pada hasil penelitian *Rebecca Jewett-Geragosian* dari Granite State Colleges seperti yang dijelaskan pada anwar et al 2022 (Anwar et al., 2022) meskipun dalam istilah yang berbeda, tetapi memiliki arti, sifat dan sifat yang sama. karakteristik pemimpin yang bertanggung jawab atas pelatihan dalam ketiga model tersebut adalah:

1. *trait model / trait theory* : Berdasarkan karakteristik pemimpin, pemimpin memiliki karakteristik yang sama kecerdasan, penilaian, kepercayaan, kejujuran dan sosial, kepemimpinan Bersama wawasan tentang kekuatan dan kelemahan, pemimpin tidak memperhatikan efek/situasi, pemimpin tidak fleksibel;
2. *behavioral model / style approach* : Berbasis perilaku pemimpin, mengkaji bagaimana perilaku pemimpin mempengaruhi kelompok dalam dua cara, yaitu orientasi tugas (membantu kelompok mencapai tujuan) dan orientasi hubungan (membantu anggota), efektif dalam situasi terbatas; dan
3. *contingency model / contingency theory* : Percaya pada kelayakan seorang pemimpin yang berfungsi kemampuan dalam situasi tertentu berdasarkan ruang lingkup penugasan/manajer/struktur hubungan anggota dan posisi kekuasaan, fokus situasi/kontekstual, motivasi tugas, hubungan interpersonal termotivasi dan fleksibel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Styles and Traits Theory by Rebecca Jewett-Geragosian 2018 (Anwar et al., 2022)

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang akuntabilitas pendidikan berdasarkan psikologi adalah tanggung jawab emosional setiap orang terhadap perasaan kemanusiaan sebagai hasil dari aktivitas pendidikannya, yang dalam arti harus dilakukan memperhitungkan sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya.

Sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan menjadi panutan pribadi yang juga jujur dan transparan siap untuk diuji, menjadi teladan berarti menjadi panutan pribadi / contoh yang bersedia menanggung apa pun risiko, dan menjadi pribadi yang

mampu menanggung beban keadaan masyarakat yang mewakilinya dan siap mengevaluasinya kapan saja,

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Sosiologi

Salah satu mazhab sosiologi yang dapat dijadikan landasan akuntabilitas pendidikan adalah *fungsionalisme struktural* dengan tokoh-tokoh seperti *Emile Durkheim dan Talcott Parsons*, yang ide intinya adalah sistem sosial seperti organ tubuh. Akuntabilitas pendidikan dipandang sebagai prasyarat dari hirarki stratifikasi sosial. Akuntabilitas pendidikan bekerja dalam sistem yang berlapis dan semuanya berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, akuntabilitas pendidikan adalah kebutuhan sistem stratifikasi sosial, bukan apa adanya dari "status" tertentu, tetapi dalam sistem status sosial. Setiap posisi yang diwakili, seperti organ tubuh, adalah jantung, hati, dan ginjal. Jadi. Semua organ berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fungsional tubuh. Ketika posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial menjadi tidak teratur maka masyarakat sedang mengalami kekacauan. (Rukiyati & Purwastuti, 2015).

Menurut sosiologi *fungsionalisme struktural* (Rukiyati & Purwastuti, 2015) ada tiga bentuk stratifikasi yang berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan, yaitu:

1. stratifikasi politik, yaitu anggota masyarakat berdasarkan tingkat kekuatannya, termasuk kasta, oligarki, dan demokrat. Lapisan politik ini terdiri dari sekelompok elit beberapa penguasa. Para penguasa ini dan anggotanya memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk mengatur gerak-gerik masyarakat. Biasanya properti kelas penguasa seperti itu tampak dalam sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan feodal dan otoriter, tetapi itu masih terjadi bahkan dalam pemerintahan yang demokratis khususnya di lembaga birokrasi negara dan lembaga swasta lainnya mengikuti hirarki organisasi. Pada dasarnya, kehormatan seseorang diukur berapa banyak kekuatan yang dia miliki;
2. stratifikasi ekonomi, yaitu anggota masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan materi yang termasuk kelas atas (kehidupan berlebihan), sedang (hidup berkecukupan) dan rendah (hidup kurang/miskin). Stratifikasi ekonomi ini biasanya merupakan lapisan atas dihuni oleh individu/kelompok yang dapat memperoleh kekayaan finansial dalam jumlah banyak, sedangkan lantai bawah ada yang tidak berhasil mengumpulkan sejumlah besar kekayaan finansial. Pada dasarnya suatu kehormatan seseorang diukur dari berapa banyak kekayaan yang dia miliki; dan

3. stratifikasi status sosial, yaitu anggota masyarakat berdasarkan kehormatan, termasuk gelar kebangsawanan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan (sangat tinggi, mis dan dosen, setinggi SMA dan mahasiswa, sedang SMA, rendah seperti sekolah dasar dan menengah dan buta huruf). Menurut sosiolog terkenal *Max Weber*, pada stratifikasi status sosial ini memungkinkan seorang individu memainkan berbagai pola interaksi sosial yang membuatnya menjadi pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika individu/kelompok memiliki lebih dari satu status (posisi sosial) dalam kehidupan masyarakat pembentuknya lebih dihormati dan dihargai. Pada dasarnya kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar kebangsawanan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan

Akuntabilitas pendidikan didasarkan pada pemahaman sosiologi berarti tanggung jawab atas proses pendidikan berbasis pengetahuan sosial, termasuk produk pemikiran sosiolog yang terarah dan sesuai dengan tujuan. Dari paparan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis sosiologi adalah pertanggungjawaban sosial setiap orang kepada posisi masyarakat akibat perbuatannya, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, baik stratifikasi politik, ekonomi maupun status sosial.

Sebagai seorang pemimpin pada sebuah lembaga pendidikan yang memegang kekuasaan maka selalu mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai status sosial masyarakat demi menjawab dinamika pendidikan ke depan, pemimpin dapat bekerja sama ia dapat dimintai bantuan, pendapat dan kerjasama untuk kepentingan program lembaga pendidikan, pemimpin mampu mengelola sumber daya dan potensi seluruh warga lembaga pendidikan dari seluruh posisi dan status sosial.

PENUTUP

Akuntabilitas pendidikan dapat disimpulkan dari pembahasan sebelumnya :

1. berbasis berdasarkan agama kepada Tuhan sebagai akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus adil, baik hati, memuaskan, tidak menipu, tidak melanggar aturan dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri.
2. berbasis filsafat adalah tanggung jawab mental untuk aturan berpikir logis akibat dari suatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati substansial, abadi, pragmatis dan progresif dan rekonstruktif.

3. berbasis psikologi adalah tanggung jawab emosional untuk merasakan manusia tentang sesuatu tindakan pendidikan yang harus dilakukan dengan hati-hati karakter, perilaku, dan situasi yang tepat di sekitarnya.
4. berbasis sosiologi adalah tanggung jawab sosial atas kedudukan sosial melalui pendidikan, harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, stratifikasi status politik, ekonomi dan sosial.

Peran pemimpin yang akuntabel sebagai pemimpin perubahan yaitu pertama berperan untuk menentukan visi, misi, serta arah dan target yang ingin dicapai lembaga sekaligus sebagai penanggung jawab atas semua program dan kegiatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Saifullah, I., Al Mighwar, M., & Nurjaman, U. (2022). Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, dan Sosiologi. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 101–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.239>
- Hamdi, M. M. (2020). Evaluasi kurikulum pendidikan. *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 66–75.
- Kristiawan, M. (2016). Filsafat Pendidikan. *Yogyakarta: Valia Pustaka*.
- Maryono, M. (2018). Akuntabilitas Sekolah; Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 29–41.
- Naerih, N., & Nurtiana, N. R. (2021). Peran Guru Dalam Pembangunan Mutu Pendidikan Melalui Proses Pembelajaran. *Ojs3. Umc. Ac. Id*, 168–173.
- Saidah, A. H. (2020). Pemikiran Essensialisme, Eksistensialisme, Perennialisme, dan Pragmatisme dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AL ASAS*, 5(2), 16–28.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.
- Rukiyati &, & Purwastuti, L. A. (2015). MENGENAL FILSAFAT PENDIDIKAN. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–151.
- Zahro, A. M. (2018). Kepemimpinan Perubahan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Studi Islam*, 10(2), 1–14.
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountability>
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/education>
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/75>

HR. Muslim